

**DAMPAK KEBIJAKAN ABENOMICS JEPANG DALAM MENGHADAPI  
DOMINASI EKONOMI CHINA DI KAWASAN ASIA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan*

*Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

**MUHAMMAD IQBAL AMIN**

**E061191023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**SKRIPSI**

**DAMPAK KEBIJAKAN ABENOMICS JEPANG DALAM MENGHADAPI  
DOMINASI EKONOMI CHINA DI KAWASAN ASIA**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD IQBAL AMIN**

**E061191023**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen*

*Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universitas Hasanuddin*

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK KEBIJAKAN ABENOMICS JEPANG DALAM  
MENGHADAPI DOMINASI EKONOMI CHINA DI KAWASAN  
ASIA

N A M A : MUHAMMAD IQBAL AMIN

N I M : E061191023

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 21 Agustus 2023




Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**M. Imran Hanafi, MA, M.Ec**  
NIP. 196307041988031001

  
**Nurjannah Abdullah, S.IP, MA**  
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :  
Ketua Departemen Hubungan Internasional,



  
**Prof. H. Darwis, MA., Ph.D.**  
NIP. 196201021990021003

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK KEBIJAKAN ABENOMICS JEPANG DALAM MENGHADAPI DOMINASI EKONOMI CHINA DI KAWASAN ASIA

N A M A : MUHAMMAD IQBAL AMIN

N I M : E061191023

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 21 Agustus 2023.

TIM EVALUASI

Ketua : M. Imran Hanafi, MA, M.Ec

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MUHAMMAD IQBAL AMIN  
NIM : E061191023  
PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
JENJANG : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**“DAMPAK KEBIJAKAN ABENOMICS JEPANG DALAM MENGHADAPI  
DOMINASI EKONOMI CHINA DI KAWASAN ASIA”**

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Agustus, 2023

Yang Menyatakan,



(MUHAMMAD IQBAL AMIN)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivita akademik Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MUHAMMAD IQBAL AMIN  
NIM : E061191023  
PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
JENJANG : S1

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Hasanuddin, **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive-Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya berjudul:

**“DAMPAK KEBIJAKAN ABENOMICS JEPANG DALAM  
MENGHADAPI DOMINASI EKONOMI CHINA DI KAWASAN ASIA”**

Bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Hasanuddin berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 22 Agustus, 2023

Yang Menyatakan,



(MUHAMMAD IQBAL AMIN)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas rahmat dan karunia Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan dengan baik penelitian yang berjudul “Dampak Kebijakan Abenomics Jepang dalam Menghadapi Dominasi Ekonomi China di Kawasan Asia”. *Shalawat* serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sosok yang menjadi teladan bagi penulis agar terus berbuat baik dan senantiasa bersemangat serta ikhlas dalam menjalankan segala aktivitas termasuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin, Faskultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional.

Ketertarikan penulis terhadap negara Jepang telah mengantar penulis untuk membaca dan meneliti isu-isu terkait negara tersebut yang pada akhirnya membuat penulis memutuskan untuk memilih skripsi dengan tema ekonomi yang membahas rivalitas ekonomi antara Jepang dan China di kawasan Asia Tenggara. Penulis mengakui dan menyadari dalam proses penyelesaian program sarjana hingga selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, arahan dan bimbingan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada,

1. Bapak Madeaming, S.Pd. dan Ibu Hj. Anisah, S.Pd. selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa terus memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menjalani dan menyelesaikan pendidikan penulis. Terima kasih atas doa-doanya yang tidak henti-hentinya kedua orang tua penulis panjatkan tanpa rasa penat, keluh dan kesah yang telah banyak membantu penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran.
3. Bapak Dr. Phil. Sukri, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, beserta jajaran.
4. Bapak Prof. H. Darwis, M.A., Ph.D. selaku Kepala Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin.
5. Bapak M. Imran Hanafi, M.A., M.Ec. selaku pembimbing I dan Ibu Nurjannah Abdullah S.IP., M.A. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta memberikan ilmu dan saran-saran dalam penelitian maupun penyusunan skripsi yang telah penulis lakukan.
6. Ibu Atika Puspita Marzaman, S.IP., M.A. yang telah menjadi pembimbing penulis dalam masa penyusunan proposal penelitian.
7. Seluruh dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin yang telah memperluas wawasan dan membangun

- kerangka berpikir ilmiah penulis sehingga memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai sarjana ilmu hubungan internasional.
8. Staff administrasi Departemen Ilmu Hubungan Internasional baik untuk kak Rahma dan pak Rido yang membantu dan memudahkan penulis dalam melengkapi seluruh syarat dan prasyarat penyelesaian skripsi.
  9. Kedua kakak penulis yaitu, Nur Ismayani dan Yulmiastri. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya yang telah banyak memotivasi penulis dalam menjalani keseharian penulis sebagai mahasiswa sampai pada saat penulis menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana.
  10. Kak Nurjannah Abdullah, S.IP., M.A. bukan sebagai pembimbing skripsi ataupun hubungan hierarkis antara dosen dan mahasiswa, tetapi sebagai sahabat untuk penulis. Dengan seluruh lini masa yang telah penulis lalui bersama Kak Jannah mulai dari PKM 2022, perjalanan ke Bira, magang KPID, dan banyak lagi kebersamaan lainnya, sedih rasanya sebab wisuda akan menjadi penutup ceritanya. Namun, penulis berharap untuk dapat bertemu kembali pada kesempatan lain dan menjadi lebih baik dari sebelumnya bersama dengan anak maniez andalannya si Babul dan Iccang. Doakan kami sukses dalam setiap pilihan hidup, usaha, dan takdir yang kami jalani di masa yang akan datang. Sebab bagi kami, Kak Jannah adalah dosen, mentor, dan sahabat berbagi cerita yang menyenangkan dengan banyak semangat, dorongan, dan pedoman yang telah diberikan kepada kami.
  11. Terima kasih kepada Wahdania Hamzah yang telah meminjamkan printer EPSON I3150 miliknya telah banyak berjasa bagi salinan skripsi penulis. Terlepas dari itu terima kasih telah menjadi tempat bertanya dan mendengar keluh kesah penulis pada setiap kesempatan serta motivasi dan dorongannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang telah penulis lakukan. kepada Reza Febriansyah Asaad, terima kasih telah menjadi sahabat sejak awal kita maba dan satu kost-kostan sampai menjadi mahasiswa dengan *body* bapak-bapak seperti sekarang dan sudah beda kost. Terima kasih untuk *weekend* dengan *movie night* dibanding keluar nongkrong, dan menjadi tontonan penulis saat bermain game. Terima kasih telah menampung penulis sampai subuh dan menjadikan kamarnya sebagai *base camp* bersama Tepe. Semoga tradisi awal bulan dengan PHD tetap berlanjut.
  12. Terima kasih kepada partner usul judul - seminar proposal yang selalu saling support dalam berbagai hal, Rizqy Ashabul Yamin Darwis dan Muhammad Nurichsan Gazali. Trio Kwek-kwek yang memiliki ambisi terselubung dibalik semua kata manisnya. Untuk Rizqy, walaupun kita bukan partner di seminar hasil, namun saya harap kita mampu wisuda dalam periode yang sama. Lalu untuk Ichsan, pesan saya banyak-banyak istirahat, tetap fokus selesaikan studi, selalu ambil Hikmah-



Nya. Tetap yakin semua kerja kerasmu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Pesan penulis kepada keduanya, semoga usaha Sepeda Kita dapat berjalan secepatnya.

13. Kepada teman-teman grup yang tidak konsisten namanya (sekarang bernama *Suki Friends*). Dadang, Farid, Ade, Agrisa, Indah, Hesti, Fira, Nugrah, Ega, Rara, Dika, sahabat sejak masih bocah SMP sampai sekarang yang setiap *member* grupnya sudah siap menikah. Terima kasih telah banyak memberikan keceriaan bagi penulis meskipun debat dan marah-marahnya juga banyak. Hal tersebut telah menjadi hal berharga bagi penulis dan menjadi kenangan yang luar biasa. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan kepada penulis dan mohon maaf apabila penulis masih belum bisa memberikan apa-apa ataupun menjadi pribadi dan sahabat yang baik buat kalian. *But overall you guys is the best.*
14. Kepada Kallolo Silo' (Pak Rahmat, Arjun, Awal, Ade, Ekki, Farid, Nicky, Ompang, Issa, Opi). Terima kasih telah menjadi kawan yang solid sejak bangku SMA sampai sekarang. Terima kasih Pak Rahmat untuk semua cerita dan wejangan-wejangannya sebagai *the best English teacher* sekaligus teman dan mentor bagi kami semua selama ini.
15. Terima kasih untuk Tim Anak Maniez tanpa terkecuali, baik Kak Jannah, Baboel, Captaing Iccang, Yusril SJ, dan Puang Abdi. Penulis berharap dapat menuliskan lebih banyak sejarah dengan kalian tidak hanya dijenjang kampus tetapi juga diberbagai kesempatan lainnya. Terima kasih untuk semua pengalaman dan pembelajaran yang berharga selama ini.
16. Tim Posko 6 KKNT 108 Kopi Kahayya. Fahrial, Wani, Ummul, Sri, Dila, Aya, Mudi, Ayuma, Adita, Jibrin, dan Kak Akhsan. Kordes andalan Fahrial yang setia menghadiri seminar anggota-anggotanya. Terima kasih atas semua rasa ceria, sedih, marah, dan dramanya selama kurang lebih 56 hari tinggal bersama di rumah Pakde Oro Gading yang terbaik layaknya hotel bagi anak KKN. Semua hal tersebut merupakan pengalaman yang tak tergantikan dan akan dikenang selamanya. Semoga kita semua dapat bertemu kembali dikehidupan selanjutnya dan berbagi berbagai cerita hidup masing-masing yang akan kita jalani.
17. Terima kasih untuk Tim PKM 2022, Kak Jannah, Babul, Iccang, Kak Talib, dan Nurwa. Terima kasih untuk pembelajaran yang sangat berharga Di samping itu, penulis ingin banyak mengucapkan maaf. Maaf atas mimpi -mimpi hebat kita menuju Pimnas yang tidak mampu terwujud. Maaf atas kerja keras yang telah kalian lakukan namun tidak berhasil apa-apa. Maaf atas waktu yang telah kalian luangkan untuk

sesuatu yang tidak berhasil. Mimpi Pimnas kini terkubur bersamaan dengan munculnya usulan judul skripsi ini.

18. Seluruh Historia 19, utamanya untuk teman-teman yang berkontribusi besar dan belum disebutkan dalam draft nama diatas seperti Mita yang banyak memberi info tugas dan perkuliahan, Rio yang menjadi partner basket, dan Nanda yang ternyata sepupu penulis. Pesan saya untuk Historia, Sukses untuk kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dibutuhkan kritik dan saran untuk membuat skripsi ini menjadi lebih baik. Tiada kata yang mampu menggambarkan rasa terima kasih penulis atas tiap pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini mampu memberi dedikasi pada perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.

Penulis

Muhammad Iqbal Amin

## ABSTRAK

Muhammad Iqbal Amin, 2019, E061191023. Skripsi dengan judul “**Dampak Kebijakan Abenomics Jepang dalam Menghadapi Dominasi Ekonomi China di Kawasan Asia**”. Di bawah bimbingan **M. Imran Hanafi, MA., M.Ec.** sebagai Pembimbing I dan **Nurjannah Abdullah, S.IP., M.A.** sebagai Pembimbing II. Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam mengatasi resesi berkepanjangan yang dihadapi, pemerintah Jepang dibawah kepemimpinan PM Shinzo Abe meluncurkan sebuah kebijakan dalam rangka memperbaiki perekonomian masyarakat Jepang yang dikenal dengan “Abenomics”. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran kebijakan Abenomics dalam pemulihan ekonomi Jepang dan dampak kebijakan Abenomics dalam menghadapi dominasi ekonomi China di Kawasan Asia Tenggara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua teori atau konsep yaitu konsep ekonomi Keynesian dan konsep kebijakan luar negeri. Kebijakan Abenomics berfokus pada Tiga Anak Panah atau “*Three Arrows*” yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan reformasi struktural. Dalam implementasinya, kebijakan Abenomics menghasilkan *output* yang beragam. Pengaruh dari implementasi kebijakan Abenomics pada pertumbuhan ekonomi Jepang terhadap dominasi China di kawasan Asia Tenggara dapat dilihat dalam bentuk rivalitas kedua negara pada sektor investasi infrastruktur. Kedua negara bersaing dalam memperebutkan proyek infrastruktur di negara-negara Asia Tenggara. Hal ini terlihat dari kerja sama proyek pembangunan infrastruktur baik Jepang dan China di Indonesia, Negara-negara Mekong, dan Thailand.

**Kata Kunci:** Abenomics, Ekonomi, Infrastruktur, Resesi, Rivalitas

## **ABSTRACT**

Muhammad Iqbal Amin, 2019, E061191023. In ***"The Impact of Japan's Abenomics Policy in Facing China's Economic Dominance in the Asian Region"***. With ***M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.*** as the First Supervisor and ***Nurjannah Abdullah, S.IP., M.A.*** as Second Supervisor. Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

*To overcome the prolonged recession, the Japanese government under the leadership of Prime Minister Shinzo Abe launched a policy to improve the Japanese economy known as "Abenomics". The purpose of this paper is to find out how the role of Abenomics policy in Japan's economic recovery and the impact of Abenomics policy in facing China's economic dominance in the Southeast Asian Region. The analysis technique used in this research uses two theories or concepts, namely the concept of Keynesian economics and the concept of foreign policy. Abenomics policy focuses on the Three Arrows, namely monetary policy, fiscal policy, and structural reform. In its implementation, the Abenomics policy produced diverse outputs. The effect of Abenomics policy implementation on Japan's economic growth against China's dominance in Southeast Asia can be seen in the form of rivalry between the two countries in the infrastructure investment sector. Both countries compete for infrastructure projects in Southeast Asian countries. This can be seen from the cooperation of infrastructure development projects between Japan and China in Indonesia, Mekong countries, and Thailand.*

*Keywords: Abenomics, Economy, Infrastructure, Recession, Rivalry*

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI .....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS<br/>UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b> | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>vi</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>x</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>   | <b>xiv</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang.....  | 1          |
| B. Batasan Dan Rumusan Masalah .....  | 8          |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....   | 8          |
| 1. Tujuan Penelitian .....  | 8          |
| 2. Kegunaan Penelitian .....  | 9          |
| D. Kerangka Konseptual.....   | 9          |
| 1. Konsep Ekonomi Keynesian.....  | 10         |
| 2. Kebijakan Luar Negeri.....   | 11         |
| E. Metode Penelitian .....  | 14         |
| 1. Tipe Penelitian .....  | 14         |
| 2. Teknik Pengumpulan Data.....   | 15         |
| 3. Teknik Analisis Data.....  | 15         |
| 4. Metode Penulisan.....  | 16         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>   | <b>17</b>  |
| A. Konsep Ekonomi Keynesian.....  | 17         |
| B. Kebijakan Luar Negeri .....  | 25         |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>   | <b>32</b>  |



|   |           |
|---|-----------|
| A. Sejarah Perekonomian Jepang .....  | 32        |
| 1. Dinamika Perkembangan Ekonomi Jepang .....   | 32        |
| 2. Kebijakan Abenomics .....  | 43        |
| B. Perkembangan Dan Dominasi Ekonomi China .....  | 48        |
| 1. Perkembangan Ekonomi China.....  | 48        |
| 2. Dominasi Ekonomi China di Asia Tenggara .....  | 54        |
| <b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....</b>  | <b>58</b> |
| A. Peran Kebijakan Abenomics Terhadap Pemulihan Ekonomi Jepang.....                               | 58        |
| 1. Kebijakan Moneter.....   | 59        |
| 2. Kebijakan Fiskal .....   | 60        |
| 3. Reformasi Struktural.....  | 61        |
| B. Pengaruh Kebijakan Abenomics Terhadap Dominasi Ekonomi China Di<br>Kawasan Asia Tenggara ..... | 70        |
| 1. Rivalitas Investasi Infrastruktur Jepang-China di Kawasan Asia Tenggara<br>.....               | 72        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>90</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 90        |
| B. Saran .....  | 94        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>95</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| <b>Gambar 1.</b> Skema Kerangka Konsep.....  | 14 |
| <b>Gambar 2.</b> Peta Negara Jepang.....   | 32 |
| <b>Gambar 3.</b> Tingkat Pertumbuhan GDP Jepang Periode 1955-1970.....   | 38 |
| <b>Gambar 4.</b> Pertumbuhan GDP Jepang Tahun 1981-2015 .....  | 43 |
| <b>Gambar 5.</b> Peta Belt and Road Initiative China.....  | 51 |
| <b>Gambar 6.</b> Investasi China di Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan Subsektor<br>Sebelum dan Sesudah BRI ..... | 56 |
| <b>Gambar 7.</b> Nominal GDP Jepang Tahun Pada Tahun Fiskal 2011-2019 dalam<br>Satuan Triliun Yen .....          | 66 |
| <b>Gambar 8.</b> FDI Jepang di Kawasan Asia.....   | 73 |
| <b>Gambar 9.</b> FDI Jepang di ASEAN Berdasarkan Sektor Tahun 2015-2017 .....                                    | 75 |
| <b>Gambar 10.</b> Rancangan Proyek HSR Jakarta-Bandung .....   | 82 |
| <b>Gambar 11.</b> Rancangan Proyek HSR Bangkok-Chiang Mai.....   | 87 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jepang merupakan negara yang memiliki pengaruh besar di Kawasan Asia. Negara dengan julukan Negeri Matahari Terbit ini juga dikenal sebagai negara yang paling maju di Kawasan Asia baik dari segi teknologi maupun ekonomi. Negara yang terkenal dengan bunga sakurnya ini termasuk salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang besar di Asia, bahkan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia setelah mengalami pertumbuhan perekonomian yang pesat di paruh kedua abad ke-20 pasca kekalahan pada Perang Dunia II yang menghancurkan Jepang (BBCNews, 2021). Tidak heran Jepang menjadi salah satu kekuatan yang berperan penting terhadap dinamika yang terjadi di Kawasan Asia.

Pembangunan dan modernisasi di Jepang dimulai sejak era Kekaisaran Meiji yang dikenal dengan nama “Restorasi Meiji”. Melalui Restorasi Meiji, Jepang mengalami peningkatan yang besar dari segala aspek baik itu dalam aspek ekonomi, politik, pendidikan, dan militer. Dibidang ekonomi, Jepang berhasil menguasai pasar Asia pada abad ke-19, bahkan mampu menyaingi AS dan negara-negara Eropa lainnya. Melalui restorasi ini juga Jepang berubah dari negara yang agraris menjadi negara industri. Bidang pendidikan juga mengalami peningkatan pesat setelah Jepang menjadi negara Asia pertama yang masyarakatnya bebas buta huruf. Peningkatan bidang militer juga menjadi dampak dari Restorasi Meiji dimana Jepang memiliki Angkatan perang yang kuat (Ardiansyah, 2015).

Perkembangan ini menjadikan Jepang sebagai salah satu negara dengan kekuatan besar di dunia menyaingi Amerika Serikat dan negara-negara besar Eropa lainnya.

Setelah kekalahan di Perang Dunia II, dominasi Jepang di Kawasan Asia seketika redup dan terpaksa merekonstruksi negaranya melalui strategi yang berbeda. Jepang tidak lagi menjadi negara dengan kekuatan militer yang besar seperti sebelumnya. Namun, hubungan Jepang dan dunia internasional pasca perang mengalami perkembangan signifikan yang dibuktikan dengan berbagai macam perjanjian dan bergabungnya Jepang pada organisasi-organisasi internasional. Kesuksesan perekonomian Jepang juga berlangsung selama tahun 1960an (Masahide, 2018). Melalui kerja keras dan disiplin yang tinggi, Jepang mampu bangkit dari situasi buruk yang dialami negara tersebut.

Sejak awal abad ke-20, Jepang sudah melakukan berbagai kerja sama dalam memperkuat *power* yang dimilikinya termasuk hubungan bilateral dengan China. Hubungan Jepang-China sendiri merupakan salah satu hubungan bilateral terpenting di dunia dan pengaruhnya terhadap dinamika di Kawasan Asia Timur. Meskipun hubungan ekonomi antara kedua negara mengalami pertumbuhan dalam tiga dekade terakhir, hal ini diperumit oleh ketegangan politik dan sejarah keduanya. Titik terendah hubungan Jepang-China terjadi pada periode tahun 2001-2006. Pada periode tersebut tidak ada kunjungan negara antara keduanya, bahkan pada tahun 2005 terjadi aksi protes anti Jepang oleh China dan memboikot produk Jepang di negara tersebut. Selain itu isu rivalitas regional juga terus tumbuh dari waktu ke waktu (Armstrong, 2009). Salah satu bagian atau faktor penting yang mempengaruhi hubungan bilateral Jepang-China yaitu ketidakjelasan pada

hubungan geopolitik yang tidak dapat diabaikan dalam menganalisis hubungan ekonomi kedua negara.

Namun dalam beberapa tahun terakhir hubungan politik Jepang-China menunjukkan tanda-tanda perkembangan, Menteri luar negeri dari kedua negara menunjukkan sikap kesediaan untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Hal ini terlihat dari sejumlah perjanjian kerja sama ditanda tangani Jepang dan China di berbagai bidang yang mencakup investasi, jaminan sosial, dan pertukaran budaya. Tidak seperti ranah politiknya, hubungan kedua negara di bidang ekonomi justru mengalami penurunan. Statistik dari *Japan External Trade Organization* (JETRO) menunjukkan bahwa investasi Jepang di China pada tahun 2012 sebesar US\$ 13,5 miliar mengalami penurunan menjadi US\$ 10,8 miliar pada tahun 2018. Statistik resmi yang dikeluarkan China juga menunjukkan *foreign direct investment* (FDI) Jepang untuk China menurun dari US\$ 20 miliar di tahun 2013 menjadi US\$ 9,8 miliar di tahun 2018 (Chiang, 2019). Selain itu terdapat seruan untuk memboikot barang-barang dari Jepang setelah sengketa wilayah pada tahun 2012 yang mempengaruhi penjualan barang *brand* Jepang di China khususnya barang elektronik dan kendaraan.

Pihak Beijing menyadari dampak dari kebangkitannya terhadap stabilitas ekonomi politik Kawasan. Setelah pertengahan tahun 2000-an, hubungan Tokyo-Beijing dipengaruhi tidak hanya dari perubahan situasi geopolitik tetapi juga oleh persaingan Jepang-China sebagai pemimpin regional. Sejumlah peristiwa juga menjadi faktor dari meningkatnya persaingan antara Jepang dan China. Mulai dari sengketa wilayah Pulau Senkaku (Diaoyu) yang sama-sama diklaim oleh keduanya,



sampai dengan persaingan militer kedua negara tersebut. Kekuatan ekonomi China yang terus bertumbuh telah menjadi tantangan bagi pengaruh Jepang di Kawasan. Pada tahun 1986, GDP Jepang 7-8 kali lebih besar dibandingkan dengan milik China. Kemudian pada tahun 2010, GDP China berhasil mengalahkan GDP milik Jepang dan membuatnya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Sementara pertumbuhan ekonomi China semakin besar, perekonomian Jepang terus mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan GDP Jepang hanya sebesar 34% dari total GDP China pada tahun 2018 (Chiang, 2019). Jepang yang memiliki rasa superioritas nasional terhadap China membuat Negeri Matahari Terbit tersebut mempunyai kesan yang kurang baik terhadap aksi hegemonik dari Negeri Tirai Bambu.

Selain itu, perekonomian Jepang juga mulai mengalami kebuntuan sejak tahun 1992. Antara tahun 1993 sampai pada tahun 2012 rata-rata pertumbuhan GDP Jepang hanya 0,8% (Hausman & Wieland, 2014). Jepang sendiri mengalami sejumlah permasalahan yang berdampak pada perekonomian Negeri Bunga Sakura tersebut selama 15 tahun terakhir. Beberapa faktor penyebab *economic down turn* yang dialami oleh Jepang seperti krisis global yang terjadi pada tahun 2008. Selain itu, beberapa faktor domestik juga berperan pada pelemahan ekonomi negara Jepang seperti, kebocoran yang terjadi pada fasilitas PLTN Fukushima yang terjadi pada tahun 2013 (Prasetia, 2016). Kebocoran yang terjadi pada fasilitas radioaktif ini tidak hanya menjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai bencana nasional namun juga menuai perhatian pada dunia internasional.

Ditengah keterpurukan ekonominya, daya saing perekonomian Jepang tidak mampu menyaingi perekonomian negara-negara besar Asia lainnya seperti China dan Korea Selatan. Kedua negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi China sendiri di abad ke-21 bersifat ekspansif dan hegemonik. Hal ini berdasarkan pada arah ekonomi politik internasional Negeri Tirai Bambu tersebut. Pertumbuhan ekonomi China ini dicanangkan dalam *China Peaceful Development Road* pada tahun 2005 melalui kebijakan yang bernama *The Peaceful Rise of China*. Selain itu pada tahun yang sama, China secara resmi bergabung dengan *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan salah satu langkah penting dalam pertumbuhan ekonomi China (Wishanti, 2016). Langkah berani yang diambil pihak Beijing dengan membuka diri dengan dunia internasional membuahkan hasil dengan membuat perekonomian China mengalami peningkatan yang pesat.

Pertumbuhan perekonomian China juga tidak bisa lepas dari pengaruh kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) China. Kebijakan ini dicanangkan oleh Xi Jinping tidak lama setelah terpilih sebagai Presiden China pada tahun 2012 lalu. Kata “*Belt*” atau sabuk mengacu pada Sabuk Ekonomi Jalur Sutera yang diperkenalkan Xi Jinping pada kunjungan negaranya ke Astana dan Kazakhstan. Sementara itu “*Road*” mengacu pada jalur sutera maritim abad ke-21 yang diperkenalkan pada kunjungan kenegaraannya ke Indonesia dan saat menghadiri pertemuan para pemimpin *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) pada tahun 2013. Berdasarkan visi dan misinya, BRI mencari kerja sama dengan negara-negara Asia, Eropa, dan Afrika dalam mendukung kerja sama ekonomi regional,

memperkuat pertukaran ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Pada September 2018, sebanyak lebih dari 130 negara dan organisasi internasional telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan China (Dunford & Liu, 2019). Kebijakan BRI ini memegang peranan penting dalam peningkatan perekonomian China yang pesat dalam satu dekade terakhir.

Salah satu bagian dari kebijakan BRI China ini termasuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti rel kereta, jalanan, dan pelabuhan di sejumlah negara di dunia dengan dana pinjaman dari China senilai miliaran dolar. Proyek besar dari pemerintah China ini menghasilkan perbaikan sejumlah infrastruktur negara-negara berkembang di dunia. Di sisi lain, China mendapatkan pasar bagi hasil industri mereka serta mendapatkan fasilitas pemasok bahan mentah. Sementara itu, Afrika yang juga memanfaatkan investasi dari China membantu Beijing dalam satu dekade terakhir menjadi mitra perdagangan nomor satu di benua tersebut (CNN Indonesia, 2018).

Pengaruh yang diberikan oleh China melalui kebijakan ini juga dirasakan oleh negara-negara berkembang di Asia dalam bidang infrastruktur. Asia Tenggara yang mayoritas negaranya berada pada kategori berkembang, memiliki daya beli yang tinggi sehingga memberikan keuntungan bagi China dalam mendistribusikan komoditas mereka. Oleh karena itu, Kawasan ini merupakan wilayah yang strategis bagi pemerintah China (Surung, 2023). Melalui kebijakan ekonomi yang agresif ini, Xi Jinping mampu membangkitkan perekonomian China menjadi negara hegemoni di Kawasan Asia mengalahkan dominasi dan pengaruh Jepang yang terus

mengalami resesi. China bahkan mampu menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Dalam mengatasi resesi berkepanjangan yang dihadapi Jepang, pemerintah Negeri Matahari Terbit tersebut dibawah kepemimpinan PM Shinzo Abe meluncurkan sebuah kebijakan dalam rangka memperbaiki perekonomian masyarakat Jepang yang dikenal dengan “Abenomics”. Abe meluncurkan kebijakan ini pada periode keduanya menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada Desember 2012 sampai dengan September 2020 (Ito, 2021). Langkah yang diambil Shinzo Abe ini kemudian menjadi keputusan yang krusial bagi perkembangan perekonomian Jepang.

Abenomics diharapkan mampu mengakhiri kemerosotan Jepang melalui tiga fokus utama yaitu, pelonggaran moneter yang agresif, kebijakan fiskal yang fleksibel, dan reformasi struktural. Salah satu contoh dari penerapan Abenomics yaitu Bank of Japan (BoJ) yang merupakan bank sentral Jepang mengeluarkan target inflasi sebesar 2% pada Februari 2013 (Michelis & Iacoviello, 2016). Sejak dikeluarkannya kebijakan ini, pertumbuhan ekonomi Jepang mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Jepang pada tahun 2013 mencapai angka sebesar 2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 1,5% (Sharon, 2019). Selain itu harga saham mengalami peningkatan dan nilai mata uang Jepang, yaitu Yen juga terdepresiasi. Pertumbuhan GDP Jepang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Angka pengangguran juga berkurang dari 4,1% pada November 2012 menjadi 3,8% pada Juni 2014 (Wakatabe, 2015).

Melihat langkah pemerintah Jepang dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang dialami negara tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana strategi pemerintah Jepang melalui kebijakan Abenomics dalam rangka pemulihan ekonomi Jepang dan bagaimana pengaruh dari kebijakan Abenomics terhadap dominasi yang dimiliki China di Kawasan Asia.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis membatasi kajian penelitian pada strategi kebijakan Abenomics dalam membangkitkan perekonomian domestik Jepang dan pengaruh kebijakan tersebut terhadap dominasi ekonomi China di Kawasan Asia Tenggara yang dianalisis berdasarkan sampel dari beberapa negara di kawasan tersebut termasuk Indonesia dan Thailand. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data selama masa jabatan periode kedua Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang. Berdasarkan uraian yang telah penulis bahas pada latar belakang dan batasan masalah di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi kebijakan Abenomics dalam pemulihan ekonomi Jepang?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan Abenomics dalam menghadapi dominasi ekonomi China di Kawasan Asia Tenggara?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian Strategi Kebijakan Abenomics Jepang dalam Menghadapi Dominasi China di Kawasan Asia yaitu sebagai berikut:



- a) Untuk menganalisis strategi kebijakan Abenomics dalam pemulihan ekonomi Jepang.
- b) Untuk menganalisis pengaruh dari kebijakan Abenomics terhadap dominasi ekonomi China di Kawasan Asia Tenggara.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian Strategi Kebijakan Abenomics Jepang dalam Menghadapi Dominasi China di Kawasan Asia yaitu sebagai berikut:

- a) Bagi pemerhati isu ekonomi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait perkembangan perekonomian Jepang.
- b) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang bisa menambah wawasan dan sebagai sumber informasi serta referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang membahas isu serupa.

## **D. Kerangka Konseptual**

Terdapat dua konsep utama dalam membangun dan membentuk argumentasi pada penelitian ini yaitu konsep ekonomi keynesian dan konsep kebijakan luar negeri. Konsep ekonomi keynesian akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang peran kebijakan Abenomics dalam pemulihan ekonomi Jepang. Sedangkan konsep kebijakan luar negeri (*foreign policy*) akan digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai pengaruh dari kebijakan Abenomics terhadap dominasi China di Kawasan Asia Tenggara.

## 1. Konsep Ekonomi Keynesian

Konsep ekonomi keynesian merupakan teori ekonomi yang diperkenalkan oleh ekonom asal Inggris yaitu John Maynard Keynes merupakan bagian dari ekonomi makro. Teori ekonomi Keynesian menyatakan faktor utama yang mendorong aktivitas ekonomi adalah permintaan barang dan jasa. Dalam rangka meningkatkan permintaan tersebut, kebijakan pemerintah difokuskan pada intervensi langsung sebagai cara untuk mempengaruhi permintaan dan mencegah resesi. Ekonomi keynesian mempromosikan intervensi pemerintah dalam siklus bisnis dalam meningkatkan permintaan. Intervensi pemerintah termasuk dengan cara pinjaman dan belanja sebagai faktor penting dalam perekonomian terutama selama masa resesi. Dalam teori ini, keynesian berpendapat bahwa harga dan upah relatif tidak stabil sehingga pemerintah harus membantu dalam mencapai *full employment* (Probasco, 2022).

Teori keynesian berpendapat bahwa negara perlu melakukan investasi sebagai upaya pencegahan agar perekonomian tidak runtuh. Selain itu, Keynes juga berpendapat tentang pentingnya negara untuk terlibat kedalam organisasi ekonomi dan perdagangan internasional. Hal ini dianggap menguntungkan bagi perekonomian negara apabila suatu saat negara tersebut mengalami krisis (Rahmadana, et al., 2021).

Sama halnya dengan studi ekonomi makro lainnya, karakteristik dan fokus kajian yang terdapat dalam teori Keynesian ini seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, serta kebijakan fiskal dan kebijakan moneter oleh pemerintah dalam menentukan arah ekonomi suatu negara. Teori ekonomi

Keynesian dan juga aliran moneteris merupakan pelopor dari teori efektifitas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Keynesian melihat bahwa kebijakan fiskal merupakan alat yang efektif untuk mempengaruhi *output* dari suatu perekonomian (Romer & Romer, 2010). Kebijakan fiskal pada teori Keynes mengasumsikan bahwa setiap satu dolar yang dikeluarkan untuk stimulus fiskal akan menghasilkan jumlah yang lebih banyak pada pertumbuhan. Sementara itu, aliran moneteris percaya bahwa dorongan kebijakan moneter merupakan faktor terpenting yang menjelaskan variasi *output*, lapangan kerja, dan harga (Chetty & Lahiri, 1983).

Pada kasus Jepang, PM Shinzo Abe mengeluarkan kebijakan Abenomics dalam mengatasi permasalahan ekonomi Jepang. Kebijakan PM Abe ini memiliki tiga arah kebijakan utama yang terbagi kedalam kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan reformasi struktural. Kebijakan fiskal dalam Abenomics dengan meningkatkan belanja atau pengeluaran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori ekonomi Keynes yang juga merupakan ekonomi campuran dimana pemerintah dan sektor swasta memegang peranan penting dalam perekonomian. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Abenomics Jepang yang berfokus pada kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong perekonomian negara. Maka dari itu, teori ekonomi keynesian kemudian akan digunakan pada penelitian ini dalam menganalisis mengenai bagaimana strategi kebijakan Abenomics dalam pemulihan perekonomian Jepang.

## **2. Kebijakan Luar Negeri**

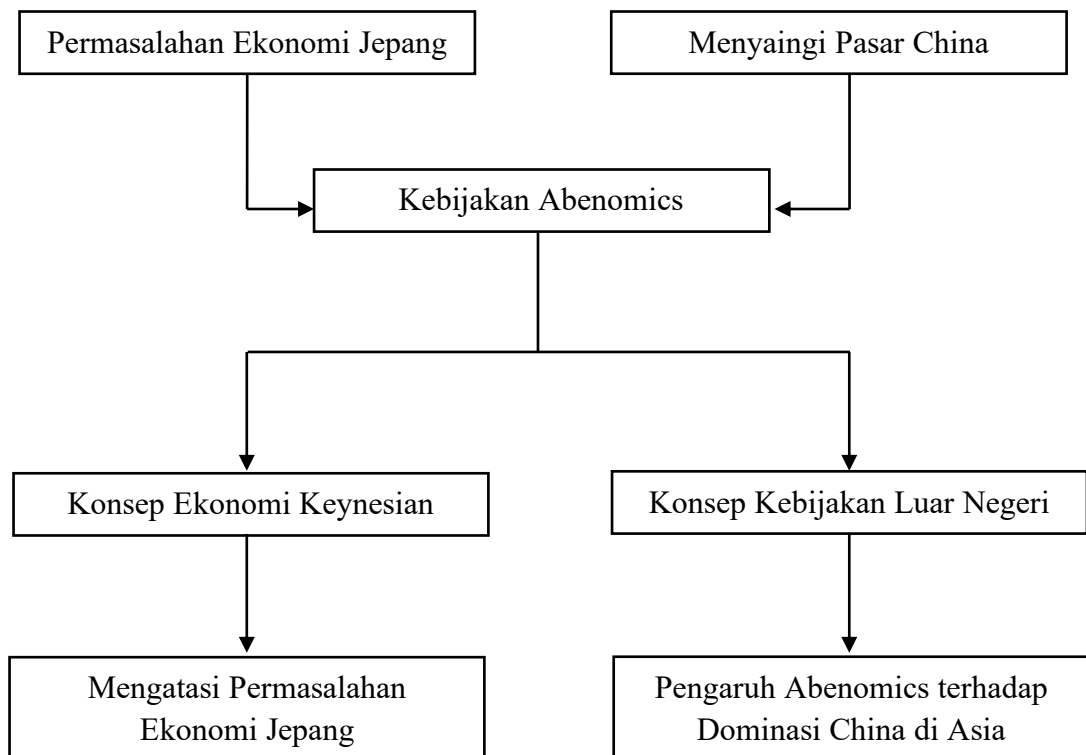
Kebijakan luar negeri (*foreign policy*) secara konseptual sering dipahami sebagai tindakan atau komitmen yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk

mempertahankan atau mengubah aspek-aspek tertentu di lingkungan internasional. Kebijakan ini diambil berdasarkan perhitungan serta orientasi tujuan yang jelas dalam memecahkan suatu masalah atau mendorong perubahan dalam dunia internasional. Dalam bentuk yang paling sederhana, kebijakan luar negeri terdiri dari pernyataan dan tindakan suatu negara dalam hubungannya dengan aktor eksternal lainnya baik itu negara maupun aktor non-negara (Dugis, 2008).

Menurut K. J. Holsti, konsep kebijakan luar negeri dibedakan menjadi 4 komponen yaitu orientasi kebijakan luar negeri, peran nasional, objektif, dan tindakan/aksi. Orientasi diartikan sebagai sikap dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan eksternal serta strategi fundamentalnya dalam mencapai tujuan domestik dan eksternal negara tersebut. Adapun peran nasional hanya terikat dengan negara yang terlibat dalam hubungan *regional*. Maka dari itu, peran nasional dianggap sebagai definisi dari pembuat kebijakan tentang jenis keputusan yang umum, komitmen, aturan, dan tindakan yang sesuai dengan negara mereka. Komponen objektif pada umumnya merujuk pada kondisi yang dilakukan oleh negara sebagai tujuan dari kebijakan luar negerinya. Ketiga komponen ini pada dasarnya terdiri dari gambaran apa yang ada dibenak pembuat kebijakan, sikap terhadap dunia luar, keputusan dan aspirasi. Sementara itu, komponen ke-4 yaitu tindakan/aksi diartikan sebagai hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak lain untuk mempengaruhi orientasi tertentu, memenuhi peran, atau mencapai dan mempertahankan tujuan. Tindakan/aksi pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk mengubah atau mempertahankan perilaku pihak/aktor lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Holsti, 1983).

Kebijakan luar negeri atau *foreign policy* juga merupakan salah satu cara yang digunakan oleh suatu negara dalam mengejar *national interest* atau kepentingan nasional negara tersebut. Maka dari itu, kebijakan luar negeri merupakan rencana atau program tindakan suatu negara yang menentukan *national interest* atau tujuan nasional negara tersebut dalam dunia internasional. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri merupakan tindakan suatu negara terhadap lingkungan eksternal dan kondisi domestik dimana tindakan atau kebijakan tersebut dirumuskan (Folarin, 2017).

Jepang melalui kebijakan Abenomics memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi negara tersebut sekaligus mengembalikan daya saing ekonomi Jepang dalam pasar regional dan global sebagai *national interest* mereka. Untuk mencapai kepentingan tersebut Jepang perlu menjalin hubungan dengan aktor internasional lainnya. Berdasarkan dengan penjelasan diatas, strategi pemerintah Jepang yang menggunakan Abenomics dalam mengembalikan kekuatan ekonominya akan dianalisis menggunakan teori kebijakan luar negeri untuk melihat bagaimana pengaruh dari implementasi kebijakan Abenomics terhadap dominasi China di Kawasan Asia Tenggara.



**Gambar 1.** Skema Kerangka Konsep (Diolah Oleh Penulis)

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan proses memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan menyajikan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk deskriptif atau kata-kata. Penelitian kualitatif dilakukan menggunakan pengaturan tertentu dengan maksud untuk menginvestigasi serta memahami fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami kondisi suatu fenomena atau konteks dengan mendeskripsikan secara mendalam dan terperinci tentang fenomena atau konteks yang sedang diteliti sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan (Fadli, 2021).

Berdasarkan tipe penelitian kualitatif tersebut, data-data dan sejumlah fakta yang terjadi di lapangan terkait strategi pemerintah Jepang dalam melawan pengaruh China di Kawasan Asia melalui kebijakan Abenomics akan dikumpulkan dan diolah. Data dan fakta tersebut kemudian dideskripsikan dan didefinisikan menggunakan alat analisis berupa teori-teori. Hasil pendefinisian akan dilengkapi dengan pendapat atau argumentasi dari peneliti untuk menciptakan hasil yang menyeluruh dan mendalam.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi pustaka atau *library research*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode *library research* merupakan metode pengumpulan data dimana teori-teori dari sejumlah literatur yang berhubungan dengan isu penelitian dipahami dan dipelajari (Fadli, 2021).

Sumber-sumber yang kredibel digunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, laman situs atau *website* resmi, serta dokumen resmi yang memiliki informasi teraktual mengenai pembahasan penelitian.

## **3. Teknik Analisis Data**

Teknik penulisan data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Menurut Sendari (2019), teknik penulisan ini menggunakan data kualitatif yang bersifat non-numerik dan dijabarkan dalam bentuk deskriptif. Dalam menganalisa data pada teknik kualitatif menggunakan tiga tahapan yaitu mengorganisir, menganalisis, dan mendefinisikan data-data yang tidak berbentuk

angka atau data non-numerik. Data yang diperoleh dari ketiga tahapan tadi kemudian menjadi acuan atau dasar dalam penarikan kesimpulan yang didapatkan.

#### **4. Metode Penulisan**

Penelitian ini menggunakan metode penulisan paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan metode penulisan yang dimana gagasan utamanya berada diawal paragraf dan dilanjutkan dengan kalimat yang bersifat khusus sebagai penjelas (Wutsqaa, 2022). Penulisan yang menggunakan metode paragraf deduktif akan menggambarkan masalah secara umum kemudian diakhiri dengan mempersempit ruang lingkup pembahasan sehingga mencapai kesimpulan yang lebih spesifik atau khusus.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Ekonomi Keynesian

Ekonomi Keynesian merupakan suatu konsep analisis yang dikembangkan pada salah satu peristiwa krisis ekonomi hebat dunia atau yang dikenal dengan istilah *Great Depression* (Depresi Hebat) pada tahun 1930-an. John Maynard Keynes merupakan ekonom asal Inggris yang menjadi sosok dibalik konsep tersebut. Keynes mengembangkan konsep ini akibat resesi yang dialami oleh Inggris pada dekade tahun 1920-an yang membuat angka pengangguran di Inggris meningkat dengan drastis. Keynes kemudian mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan ekonomi yang terjadi. Pemikirannya tersebut dituangkan di dalam bukunya yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money* pada tahun 1936. Teori Keynesian ini menekankan pentingnya peran negara atau pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan permasalahan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Keynes percaya bahwa analisis ini mampu menggantikan pemikiran ekonomi klasik yang pada saat itu mendominasi pemikiran para ekonom di Inggris dan Amerika Serikat yang menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatasi semua permasalahan ekonomi (Davidson, 2009).

Teori yang dikemukakan oleh Keynes ini dianggap sebagai titik awal dari banyak pemikiran seputar ekonomi makro (*macroeconomics*). Keynes mencoba mengembangkan pemahaman teoritis tentang mengapa pengangguran dapat bertahan dalam ekonomi kapitalis. Keynes pada saat itu mengaitkan pengangguran ini dengan kekakuan upah nominal yang menurun karena “*money illusion*” dipihak

pekerja. Dengan upah nominal yang kaku ke bawah ini membuat penurunan harga akibat resesi industri yang kemudian menyebabkan kenaikan upah riil, dan kontraksi dalam lapangan kerja. Komponen utama dalam analisis dasar teori Keynesian terdiri dari *Aggregate Demand and Supply*, *The Multiplier*, *Marginal Efficiency of Capital*, *Liquidity Preference Theory*, *Money Wages and Unemployment*. Konsep *Aggregate Demand and Supply* (Permintaan dan Penawaran Agregat) merupakan titik awal dari analisis Keynesian. Permintaan agregat mengacu pada total pengeluaran yang direncanakan dalam suatu perekonomian. Sementara penawaran agregat mengacu pada total produksi yang direncanakan. Suatu perekonomian berada pada ekuilibrium atau seimbang ketika permintaan dan penawaran agregat sama (Nachane, 2018).

*The Multiplier* (Pengganda), dasar dari pengganda Keynesian adalah gagasan terkait fungsi konsumsi yang kemudian menghubungkan konsumsi dengan pendapatan. Dalam standar kerangka Keynesian, pengeluaran pada pekerjaan umum meningkatkan pendapatan nasional lebih banyak dibandingkan pengeluaran untuk transfer pemerintah dengan besaran pengeluaran awal. Selain itu, jika setiap orang memiliki marjinal yang sama dalam kecenderungan untuk mengkonsumsi, pengaruh pengeluaran fiskal pada keuntungan nasional seutuhnya terdiri dari keuntungan langsung (Ono, 2011).

*Marginal Efficiency of Capital* (MEC), MEC merupakan tingkat kembalinya investasi dari setiap barang modal yang diharapkan dimana hal ini dipengaruhi oleh tinggi tingkat suku bunga. Keynesian menggunakan pendekatan tingkat pengembalian untuk perhitungan ekonomi yang dimana MEC digunakan

untuk memberi tingkatan pada proyek investasi. Keynes mengartikan MEC sebagai tingkat diskon yang akan membuat nilai sekarang sama dengan harga penawaran. Pada kerangka kerja tingkat pengembalian Keynesian, keputusan investasi dibuat dengan membandingkan MEC dengan tingkat bunga. Dalam aturan MEC, proyek investasi diterima jika MEC lebih besar daripada tingkat bunga. Dengan kata lain, aturan MEC adalah menerima proyek investasi apabila tingkat pengembaliannya lebih besar dari biaya modal. Sebaliknya, aturan MEC adalah menolak proyek investasi jika MEC lebih kecil dari tingkat bunga. Selain itu, ekspektasi memainkan peran penting dalam teori Keynes dan MEC. Menurut Keynes, runtuhnya MEC disebabkan oleh krisis ekonomi. MEC sepenuhnya ditentukan oleh ekspektasi investor tentang ukuran dan waktu arus kas di masa depan, sehingga MEC akan runtuh ketika terjadi keruntuhan pada ekspektasi arus kas (Fuller, 2013).

*Liquidity Preference Theory* (Teori Preferensi Likuiditas), Keynes menganggap teori preferensi likuiditasnya sebagai pengganti teori tabungan atau teori dana pinjaman. Keynes dalam bukunya menjelaskan bahwa uang merupakan prasyarat yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi dalam ekonomi produksi moneter. Dalam hal kebijakan, kebijakan moneter ditata sebagai alat jangka pendek yang dapat membantu menstabilkan ekonomi dengan mengandalkan pasokan uang. Selain itu, Keynes juga menganalisa peran sistem perbankan sebagai penyedia likuiditas dimana kontrol kebijakan moneter dan uang endogen bergantung pada perilaku bank (Bibow, 2005).

Teori preferensi likuiditas Keynes ini menyatakan hubungan antara suku bunga, preferensi likuiditas, dan kuantitas dan penawaran uang. Teori ini

menjelaskan preferensi terhadap uang atau likuiditas dan alasan untuk meminta dan mendapatkan suku bunga yang tinggi untuk aset keuangan jangka panjang. Teori ini juga merupakan teori yang menjelaskan sifat moneter dari tingkat bunga. Keynes menggambarkan model preferensi likuiditas dalam tiga motif yaitu (Vaidya, 2022):

- a) *Transaction Motive* (Motif Transaksi) menyoroti pilihan masyarakat untuk lebih memilih likuiditas untuk pengeluaran sehari-hari atau transaksi normal. Semakin tinggi pendapatan maka semakin banyak yang digunakan untuk meningkatkan pengeluaran.
- b) *Precautionary Motive* (Motif Berjaga-jaga) yaitu motif untuk menyimpan uang tunai sebagai sikap berjaga-jaga terkait kebutuhan untuk memenuhi pengeluaran tiba-tiba atau peluang yang tidak terduga.
- c) *Speculative Motive* (Motif Spekulatif) menjelaskan niat untuk mendapatkan keuntungan spekulatif dengan memanfaatkan perubahan suku bunga. Motif transaksi dan motif berjaga-jaga lebih banyak dipengaruhi oleh pendapatan dibanding suku bunga. Oleh karena itu, ketika pendapatan meningkat, cadangan kas untuk transaksi maupun berjaga-jaga juga meningkat begitu pula sebaliknya. Di sisi lain, motif spekulatif bersifat *interest elastic* yang berarti dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

*Money Wages and Unemployment* (Upah Uang dan Pengangguran), pandangan Keynes terhadap hubungan antara upah dan pengangguran cukup rumit. Bahkan Keynes memiliki dua teori terkait hal ini yaitu (Nachane, 2018):

- a) Teori Pertama, Keynes dalam bukunya menunjukkan bahwa ia sepakat dengan posisi neoklasik dengan menyatakan “... *an increase in employment can only occur to the accompaniment of a decline in the rate of real wages*”. Dalam praktiknya, pekerja dan atasan dapat menurunkan upah riil melalui proses tawar menawar upah uang. Dengan begitu, dia mengaitkan pengangguran jangka panjang dengan depresi panjang terhadap kekakuan upah uang. Kekakuan upah uang ini dapat dikaitkan dengan “*money illusion*” para pekerja pada umumnya, yang menolak upah turun dalam bentuk uang meskipun hal ini menyebabkan berkurangnya pengangguran. Dengan demikian pengurangan upah secara umum tidak dapat dicapai melalui tawar menawar antara serikat pekerja dan manajemen. Maka dari itu, satu-satunya kemungkinan adalah pengurangan upah secara umum melalui perintah pemerintah.
- b) Teori kedua lebih bersifat substantif yang menyatakan bahwa meskipun upah uang fleksibel, penurunan upah riil yang diperlukan untuk meningkatkan lapangan kerja belum tentu terjadi. Dalam teori Keynesian, terdapat tiga kemungkinan yang apabila diterapkan bersamaan akan menyebabkan peningkatan lapangan kerja. Namun jika ketiga kemungkinan tersebut tidak semuanya dapat diterapkan, hasilnya kemudian tergantung pada kekuatan relatif dari kemungkinan yang benar dan yang tidak. Tiga kemungkinan yang dipertimbangkan ini adalah penurunan upah uang yang menyebabkan peningkatan kecenderungan marginal dalam mengkonsumsi, penurunan tingkat bunga jangka panjang, dan kenaikan efisiensi modal marginal.

Teori yang dikembangkan oleh Keynes ini memberikan dasar bagi kebijakan ekonomi dalam mengatasi pengangguran dengan cara merangsang permintaan agregat. Dalam mengatasi permasalahan ekonomi, Keynes lebih memilih langkah-langkah melalui kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah untuk proyek pekerjaan umum dalam merangsang permintaan. Konsep-konsep yang terdapat pada teori ekonomi Keynesian seperti total *output* (GDP) dan permintaan agregat yang terdiri dari tiga komponen yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah dan pajak. Selain itu elemen-elemen seperti kebijakan fiskal, impor dan ekspor uang, dan suku bunga juga berpengaruh pada tingkat pendapatan (*income*). Konsep-konsep tersebut serta peran pemerintah dalam teori Keynesian merupakan sejumlah faktor dalam mengatasi keseimbangan ekonomi (Froyen, 2013).

Teori ekonomi keynesian juga mengalami perkembangan pada tahun 1970-an setelah tidak adanya kebijakan yang jelas dari teori ini untuk mengatasi stagnasi. Kritik dari para ahli ekonomi moneter yang meragukan kemampuan pemerintah dalam mengatur siklus bisnis dengan menggunakan kebijakan fiskal dan beranggapan bahwa penggunaan kebijakan moneter dapat meringankan krisis. Terdapat tiga prinsip yang menggambarkan bagaimana ekonomi bekerja dalam pandangan teori keynesian. Ketiga prinsip tersebut adalah, pertama, permintaan agregat dipengaruhi oleh sejumlah keputusan ekonomi baik itu publik maupun swasta. Kedua, efek jangka pendek terbesar dari perubahan permintaan agregat terdapat pada *output* riil dan kesempatan kerja, bukan pada harga. Ketiga, respon yang lambat dari harga dan upah terhadap perubahan penawaran dan permintaan

mengikibatkan kekurangan dan surplus berkala, utamanya tenaga kerja (Jahan, Mahmud, & Papageorgiou, 2017).

Berbagai peristiwa ekonomi dunia seperti krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 yang kemudian berdampak terhadap perekonomian sejumlah negara di dunia menyita perhatian akademisi Keynesian dalam melihat bagaimana konsep dari teori ini mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dialami negara-negara tersebut. Selain itu, sejumlah pemimpin negara menggunakan prinsip dari teori Keynesian yang berfokus pada ekonomi makro dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang tengah dialami negaranya seperti deflasi atau perekonomian yang stagnan.

Jepang yang perekonomiannya telah mengalami deflasi selama dua dekade terakhir juga terus berusaha mencari solusi dalam mengatasi pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Jepang melalui Perdana Menterinya, Shinzo Abe, meluncurkan sebuah kebijakan ekonomi yang bertujuan menghidupkan kembali perekonomian negara tersebut melalui kebijakan Abenomics. Dalam implementasinya, Abenomics berfokus pada tiga arah kebijakan yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan reformasi struktural. Melalui tiga kebijakan ini, Abenomics diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan ekonomi yang dialami Jepang selama ini dan membangkitkan kembali kekuatan ekonomi Negeri Matahari Terbit tersebut.

Keynes bersama para ahli ekonom aliran monetrais menjadi pelopor teori efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam mengatasi permasalahan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal merupakan penggunaan pengeluaran pemerintah dan

perpajakan dalam mempengaruhi perekonomian negara. Kebijakan fiskal biasanya digunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan serta mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah mempengaruhi perekonomian dengan mengubah tingkat serta jenis pajak, tingkat dan konsumsi pengeluaran, dan tingkat serta bentuk pinjaman. Kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif atau longgar merupakan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan agregat secara langsung melalui peningkatan pengeluaran pemerintah (Horton & El-Ganainy, 2022).

Implementasi kebijakan fiskal pada umumnya berbentuk barang dan jasa seperti keamanan publik, sektor pendidikan, dan jalan raya. Selain itu, tujuan kebijakan fiskal juga dapat dibagi menjadi dua yaitu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kebijakan fiskal dalam jangka pendek berfokus pada stabilisasi ekonomi makro seperti memperluas pengeluaran pemerintah dan memotong pajak untuk menstimulasi ekonomi yang sakit atau memangkas pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak untuk menghadapi kenaikan inflasi dan mengurangi kerentanan eksternal. Adapun dalam jangka panjang, kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan infrastruktur dan pendidikan (The Economic Times, 2023).

Sementara itu, kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan oleh bank sentral untuk mengatur suplai uang dalam perekonomian untuk mencapai tujuan seperti inflasi, konsumsi, likuiditas, dan stabilisasi pertumbuhan ekonomi. Dalam mencapai tujuan tersebut, bank sentral menggunakan suku bunga untuk mengatur suplai uang agar ekonomi tetap berjalan.



Menurut sebagian besar ekonom, kebijakan moneter dalam jangka panjang hanya akan menyebabkan perubahan harga sesuai perubahan jumlah uang yang beredar dan *output* (diukur dengan GDP) tidak berubah atau tetap. Dalam kondisi resesi, negara akan mengalami penurunan permintaan secara keseluruhan, hal ini dapat direspon oleh pemerintah menggunakan kebijakan yang berlawanan arah dengan perekonomian sehingga kebijakan moneter sering kali menjadi pilihan dalam menghadapi situasi tersebut (Mathai, 2022).

Dalam pandangan Keynes, kebijakan fiskal dinilai lebih efektif dalam mempengaruhi *output* atau pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terdapat dalam Abenomics akan berperan penting dalam mencapai tujuan stimulus fiskal pemerintah Jepang dalam Abenomics. Kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter ini ditambah dengan reformasi struktural memegang kunci penting dan berperan utama dalam pemulihan ekonomi Jepang yang mengalami resesi sejak dua dekade terakhir.

## **B. Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri salah satu teori dan disiplin ilmu dalam studi hubungan internasional. Konsep dari teori kebijakan luar negeri banyak diinterpretasikan oleh akademisi dan pemikir dunia. Secara historis, hampir semua pendekatan dalam studi hubungan internasional menempatkan negara sebagai aktor sentral atau aktor utama. Hal ini kemudian menyebabkan semua perspektif terkait masalah hubungan internasional mengandung pernyataan tentang kebijakan luar negeri. Berbagai macam pendekatan seperti yang berfokus pada ekonomi politik, masyarakat internasional, dan marxisme memiliki gagasan tentang apa itu negara

dan kebijakan luar negerinya masing-masing sehingga membuat teori kebijakan luar negeri bersifat intrinsik bagi teori-teori hubungan internasional (Smith, 1986).

Kebijakan luar negeri suatu negara seringkali dilihat dari segi kepribadian pemimpin negara tersebut. Oleh sebab itu, dikemukakan bahwa dalam analisis kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh gaya pengambilan keputusan yang khas oleh individu, referensi kebijakan, dan hubungan pemimpin dengan penasihat mereka. Dalam studi kebijakan luar negeri, berbagai model analisis telah dibuat dalam menganalisa perilaku para pemimpin atau pembuat kebijakan seperti *framework of eight personality traits* oleh Hermann, skema milik Etheredge untuk menentukan kepribadian politik, PsikoHistori oleh deMause, Analisis Perilaku (Raisa, 2022).

Para akademisi umumnya mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu yang sehubungan dengan interaksi bersama pemerintah negara lain. Konsep dari kebijakan luar negeri terdiri dari pernyataan dan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap hubungannya dengan aktor eksternal lainnya baik itu aktor negara maupun aktor non-negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri juga merupakan kelanjutan dari kebijakan *domestic* karena mencerminkan kepentingan nasional suatu negara. Selain itu, Modelski memandang kebijakan luar negeri sebagai suatu sistem aktivitas yang melibatkan adanya proses *input* dan *output* yang membuat *policy-maker* menjadi salah satu unsur penting dalam perumusan kebijakan luar negeri (Dugis, 2008).

Kebijakan luar negeri menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Bentuk instrumen yang

dimaksud dalam mencapai kepentingan nasional negara mencakup respon, kebijakan, maupun aksi dan reaksi suatu negara terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dalam skala internasional. Deborah Gerner kemudian berpendapat bahwa kebijakan luar negeri merupakan niat, pernyataan, dan aksi atau tindakan yang diambil oleh aktor negara (meski tidak harus selalu negara) dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan luar negeri sekaligus sebagai respon terhadap tindakan aktor internasional lainnya. Meskipun dari segi definisi kebijakan luar negeri dianggap sebagai tindakan negara terhadap hubungan dengan negara atau aktor internasional lainnya, para akademisi menekankan bahwa dalam studi kebijakan luar negeri juga melibatkan hal-hal lain yang berkaitan dengan perumusan serta implementasi kebijakan (Khawarizmi, 2021).

Menurut Rosenau dalam buku *Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods* kebijakan luar negeri dipahami sebagai suatu tindakan otoritatif yang diambil atau akan dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan keadaan, baik itu untuk mempertahankan aspek-aspek lingkungan dunia internasional yang diinginkan ataupun merubah aspek-aspek yang tidak diinginkan (Rosenau, 1974).

Rosenau membedakan tiga bagian integral dalam kebijakan luar negeri yang dikenal sebagai tiga konsep kebijakan luar negeri. Ketiga konsep ini yaitu kebijakan luar negeri sebagai kelompok orientasi, kebijakan luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana tindakan, dan kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku (Dugis, 2008).

- a) Sebagai kelompok orientasi, kebijakan luar negeri mengacu pada sikap, nilai-nilai, dan persepsi yang berasal dari sejarah negara dan keadaan strategis yang menentukan tempat suatu negara dalam politik dunia. Kebijakan luar negeri sebagai orientasi ini berfungsi sebagai pedoman pemerintah saat negara dihadapkan pada suatu kondisi eksternal yang mengharuskan mereka mengambil keputusan dan bertindak terhadap kondisi tersebut. Dengan kata lain, konsep ini merupakan kecenderungan umum dan prinsip yang mendasari perilaku suatu negara di kancah politik internasional.
- b) Kebijakan luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana tindakan mencakup strategi, keputusan nyata, serta kebijakan yang dapat diamati yang diambil oleh suatu negara ketika menghadapi kondisi di lingkungan eksternalnya. Hal-hal yang terdapat pada konsep ini sebagian besar dapat diamati dan terdiri dari tujuan tertentu serta cara-cara dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, konsep ini juga dapat diartikan sebagai penjabaran dari konsep kelompok orientasi ketika mengacu pada pembuatan kebijakan luar negeri.
- c) Adapun sebagai bentuk perilaku, kebijakan luar negeri mengacu pada fase empirisnya yang melibatkan langkah-langkah yang konkrit. Berdasarkan konsep ini, kebijakan luar negeri dilihat sebagai perilaku eksternal suatu negara.

Selain itu, kebijakan luar negeri juga merupakan engsel baik dari politik domestik dan internasional. Kebijakan luar negeri dari setiap negara dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internasional (eksternal) dan domestik (internal). Keduanya dianggap sebagai faktor yang membantu dalam membentuk dan merumuskan

kebijakan luar negeri. Beberapa indikator eksternal yang memiliki peran dan pengaruh dalam pembentukan sebuah kebijakan luar negeri yaitu, sistem internasional dan struktur kekuasaan yang mencakup *small, middle, dan big powers*, hukum internasional, organisasi internasional, aliansi, dan strategi militer (*arm race*). Sedangkan faktor internal yang berperan dalam membentuk kebijakan luar negeri yaitu, sejarah dan budaya, kondisi geografi dan populasi negara, perkembangan ekonomi dan sumber daya alam, kapabilitas militer, sistem politik, kepribadian dan karakter pemimpin negara, partai politik dan kelompok kepentingan pers dan opini publik, serta teknologi dan sains (Bojang, 2018).

Melihat dari apa yang telah dikemukakan oleh sejumlah akedimisi seperti sistem aktivitas yang diperkenalkan oleh Modelski, tiga kelompok konsep utama oleh Rosenau, terdapat setidaknya tiga aspek utama dalam kebijakan luar negeri. Tiga aspek utama ini yaitu sumber-sumber kebijakan luar negeri, pembuatan kebijakan berdasarkan dari sumber-sumber yang didapatkan, dan tindakan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan (Dugis, 2008).

Kebijakan luar negeri juga merupakan sebuah alat yang dapat mencerminkan kekuatan suatu negara. Kekuatan yang dimiliki suatu negara tidak hanya berorientasi pada sektor militer saja, tetapi juga pada sektor lainnya seperti ekonomi dan SDM. Kondisi masyarakat suatu negara yang memiliki pendidikan dan penguasaan teknologi yang baik akan mendorong negara tersebut memiliki *output* yang lebih baik juga. Hal ini juga kemudian akan berdampak pada kapasitas kekuatan yang dimiliki suatu negara. Selain itu, kebijakan luar negeri juga menjadi alat yang digunakan negara dalam mencapai tujuan nasionalnya. Melalui kebijakan

luar negeri, negara-negara di dunia juga bertujuan untuk memperlihatkan eksistensi mereka dalam sistem internasional baik itu secara global maupun *regional*. Selain sebagai bentuk hasil pemikiran, kebijakan luar negeri juga menjadi perwujudan sejumlah unsur yang menggambarkan keadaan suatu negara dan menjadi bentuk perwujudan eksistensi negara tersebut (Hambalie, 2017).

Setiap negara di dunia memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam berbagai aspek seperti politik, keamanan, maupun ekonomi. Suatu negara mengeluarkan kebijakan luar negerinya untuk mencapai kepentingan atau tujuannya dan bertindak berdasarkan sumber daya yang ada. Dalam mencapai tujuan tersebut, alat yang digunakan suatu negara yaitu menyebarkan pengaruh yang dimilikinya di suatu kawasan atau terhadap negara lain. Sumber daya yang merupakan objek fisik digunakan sebagai alat untuk membujuk aktor lain yang menjadi tujuan politik (Rachmaniyah, 2014). Maka dari itu kebijakan luar negeri juga dapat dilakukan menggunakan tiga cara yaitu dengan peperangan, kerjasama perdamaian, dan kerjasama ekonomi.

Dalam mencapai tujuannya yaitu memperbaiki dan membangkitkan perekonomian Jepang, pemerintah negara tersebut melalui Abenomics merumuskan sejumlah strategi dan kebijakan luar negeri. Strategi yang dilakukan pemerintah Jepang ini berfokus pada kerjasama ekonomi dengan aktor internasional lainnya. Melalui dampak yang diberikan Abenomics terhadap pertumbuhan ekonominya, Jepang berupaya menunjukkan eksistensinya dalam dunia internasional bahwa mereka tetap menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang besar di kawasan Asia termasuk Asia Tenggara.

Kerjasama ekonomi Jepang dengan aktor internasional lainnya yang merupakan pengaruh dari kebijakan Abenomics dianalisis menggunakan teori kebijakan luar negeri dalam melihat upaya Jepang dalam menyebarkan pengaruh dan menunjukkan eksistensinya sebagai kekuatan ekonomi yang dominan dalam menghadapi kekuatan ekonomi China di kawasan Asia Tenggara.